

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT  
MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA**

**Oleh  
Brilian Andri Jatmiko  
NIM E1A019028**

**ABSTRAK**

Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan yang sejatinya perlu diselesaikan. Kebijakan mengenai penyakit masyarakat di Kabupaten Purbalingga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyakit Masyarakat. Penegakan hukum merupakan tahapan dari suatu kebijakan atau peraturan agar peraturan atau kebijakan itu senantiasa untuk ditegakan. Berkaitan dengan penegakan hukum itu, perlu diketahui mengenai kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah terhadap penanggulangan penyakit masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara dan studi pustaka yang berlokasi di Kabupaten Purbalingga dan disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Kendala yang dialami selama melakukan penegakan hukum terdiri dari empat faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor anggaran, dan faktor masyarakat. Banyak upaya yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga salah satu nya ialah mengintensifkan Operasi cipta Kondisi.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Penyakit Masyarakat, Purbalingga**

**ENFORCEMENT OF PURBALINGGA REGENCY REGULATION NUMBER  
4 OF 2017 CONCERNING COMMUNITY DISEASE MANAGEMENT IN  
PURBALINGGA DISTRICT**

**By**  
**Brilian Andri Jatmiko**  
**NIM E1A019028**

**ABSTRACT**

*Society's disease is a social phenomenon that has existed since humans were created that actually needs to be resolved. Policies regarding community diseases in Purbalingga Regency are regulated in Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning Community Diseases. Law enforcement is a stage of a policy or regulation so that the regulation or policy is always upheld. In connection with law enforcement, it is necessary to know about the obstacles and efforts made by the government to overcome community diseases. The research method used in this research is normative juridical with the specification of this research is descriptive-analytical. This data collection method was carried out by conducting interviews and literature studies located in Purbalingga Regency and presented in the form of descriptive text. The results of this study indicate that law enforcement carried out by the Government of Purbalingga Regency is not fully in accordance with Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning Management of Community Diseases. Obstacles experienced during law enforcement consisted of four factors, namely legal factors, law enforcement factors, budget factors, and community factors. Many efforts are being made by the Government of Purbalingga Regency, one of which is to intensify the "Operasi Cipta Kondisi"*

**Keywords: Law Enforcement, Local Regulations, Community Diseases, Purbalingga**